BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu taraf hidup yang semestinya berlangsung di sepanjang proses pertumbuhan anak-anak. Taraf hidup merupakan tingkat kehidupan yang dapat menjadi tuntutan dan menjamin kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Proses pendidikan juga diarahkan untuk mencapai kemajuan potensi pada anak didik secara manusiawi sehingga kemampuan dan kepribadian dapat menjadi unggul. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara sebagai pemegang wewenang tertinggi mampu menerapkan sistem pendidikan nasional yang dapat memenuhi kehidupan masyarakat semakin lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan warga negaranya. kemudian pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisitem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi untuk menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional dan global. Usaha untuk memenuhi undang-undang tersebut maka kementerian pendidikan dan kebudayaan mengembangkan rintisan program wajib belajar 12 Tahun yang merupakan revisi dari program wajib belajar 9 Tahun. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyerakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapatkan layanan pendidikan pada

jenjang menengah khususnya SMA. Untuk mencapai rintisan wajib belajar 12 tahun, pemerintah telah menyiapkan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA ini adalah untuk membantu sekolah dalam memenuhi biaya operasional non-personalia.

Menurut petunjuk teknis (Juknis) dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaa pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat membantu dan mendorong masyerakat agar bisa mendapatkan pendidikan minimal di jenjang SMA. Selain itu, pemerintah juga ingin mewujudkan cita-cita bangsa indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang 1945 pada alinea-ke 4 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Harapan terbesar dengan adanya program dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, serta program dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis pada petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis), pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga melibatkan beberapa tim yang saling bekerja sama, antara lain tim pusat, tim provinsi, tim kabupaten/kota, sekolah, lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, maka dengan

mudahnya sekolah menjadikannya sebagai tumpuan proses pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah (BOS), agar nantinya sekolah tidak keluar dari penyimpangan dan ketentuan lainnya, agar pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dikatakan efektif.

Untuk mengukur efektivitas dalam penyediaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), kesesuaian jumlah dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan jumlah siswa dalam madrasah, dan keseimbangan antara sasaran, program dan tujuan (puntong). Dengan demikian, jika ketiga indikator ini dapat dijalankan dengan baik, maka sudah semestinya menjadi salah satunya yang dapat mendukung program dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak diberikan secara tunai kepada peserta didik. Akan tetapi, digunakan untuk operasional sekolah. salah satunya pengadaan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK) dan membayar gaji guru horer dan lain sebagainya. Tentunya penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak boleh keluar dari jalur juknis dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah ditentukan oleh kementerian. Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2016 penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya di transfer ke rekening sekolah secara langsung

dalam bentuk hibah. Pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA diatur dengan beberapa peraturan, yaitu :

1.1.1 Peraturan Presiden yang mengatur Rincian APBN.

1.1.2 Peratruan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah SMA dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.

1.1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA di daerah dan mekanisme penyaluran dari khas daerah ke sekolah.

1.1.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengenai masalah mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, dukungan administrasi dan sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Untuk menjalankan pendidikan dengan berbagai komponen tersebut dibutuhkan manajemen sebagai pengarahan sekaligus bahan penggerak dalam menjalankan pendidikan. Sementara mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada

prestasi yang dicapai atau hasil yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurung waktu tertentu.

Berdasarkan observasi awal peneliti di SMA Negeri 11 Kendari, adanya masalah yang kerap terjadi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yakni, mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan jadwal kebutuhan di sekolah sehingga berdampak pada rendahnya mutu pendidikan dari aspek sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang proses belajar mengajar yakni terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan plavon, kursi dan meja yang mengalami kerusakan dan kurangnya peralatan ilmu teknologi (IT) seperti komputer dan wifi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian di SMA Negeri 11 Kendari dengan judul "**Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 11 Kendari".**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif yaitu "pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di SMA Negeri 11 Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1.3.1 Bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada masa pandemi Covid-19 di SMA Negeri 11 Kendari ?

1.3.2 Bagaimana mutu pendidikan di SMA Negeri 11 Kendari ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada masa pandemi covid-19 di SMA Negeri 11 Kendari.

1.4.2 Untuk mengetahui mutu pendidikan di SMA Negeri 11 Kendari.

1.5 Manfaat Penelitan

1.5.1 Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang terkait dengan pengelolaan dan bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di SMA Negeri 11 Kendari. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dalam rangka memperkaya referensi dalam penelitian masa depan dan sebagai bahan bacaan di Perpustakaan.

1.5.2 Secara praktis

1.5.2.1 Bagi sekolah

Hasil penelitian ini dijadikan bahan evaluasi sekolah apakah pengelolaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) sudah berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemic covid-19.

1.5.2.2 Bagi guru

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan tambahan bagi perbaikan dan pengembangan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada tingkat sekolah menengah atas.

1.5.2.3 Bagi dinas pendidikan

Sebagai bahan masukan dalam merumuskan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah diserhakan pemerintah untuk disalurkan kepada sekolah pada tingkat SMA.

1.5.2.4 Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu wahana dalam penerapan teori-teori yang diperoleh, penelitian ini juga bermanfaat untu memperluas pengetahuan, wawasan dan informasi tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

1.5.2.5 Bagi peneliti lainnya

Peneltian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya dan mampu mengembangkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang lebih luas lagi.

1.6 Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yakni, variabel pertama pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dan variabel kedua mutu pendidikan. Untuk menghindari pemahaman yang keliru atau penafsiran yang salah terhadap pendeskripsian kedua variabel tersebut maka, perlu dikemukakan pengertian kedua variabel yang dimaksud peneliti:

1.6.1 Dana bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang berupa pemberian dana kepada SMA Negeri dan Swasta untuk membantu memenuhi biaya operasional non personalia sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran.

1.6.2 Mutu pendidikan merupakan kemampuan lembaga dalam mengelola perubahan secara total dan sistematik yang dimulai dari perubahan nilai-nilai, visi, misi dan tujuan agar menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan yang di hargai publik dirana akademik.